KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : BBM Dicampur etanol: transisi energi tak perlu buru-buru
Tanggal : Selasa, 14 Oktober 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

BBM Dicampur Etanol

Transisi Energi Tak Perlu Buru-buru

ANGGOTA Komisi VI DPR Nevi Zuairina mendukung rencana Pemerintah yang akan mencampur Etanol 10 Persen (E10) ke Bahan Bakar Minyak (BBM). Kebijakan ini sejalan dengan upaya nasional menuju energi bersih, pengurangan impor BBM, serta pencapaian target Net Zero Emission pada tahun 2060.

Namun, Nevi menyarankan implementasi kebijakan tersebut dilakukan secara bertahap dan tidak terburu-buru. "Infrastruktur pendukung, kesiapan pasokan bioetanol dalam negeri, dan kesiapan kendaraan, terutama kendaraan lama, harus benar-benar diperhitungkan," ujarnya, kemarin.

Diketahui, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berencana menaikkan kandungan etanol dalam BBM menjadi 10 persen. Tujuannya untuk meningkatkan kemandirian energi dan jumlah impor BBM berkurang.

"Kemarin kami rapat dengan Bapak Presiden, beliau sudah menyetujui untuk direncanakan mandatory 10 persen etanol," kata Bahlil Indonesia di Langgas Energi di Sarinah, Jakarta, Selasa (7/10/2025).

Kembali ke Nevi, Pemerintah perlu memastikan kesiapan industri dan infrastruktur agar transisi tidak menimbulkan masalah baru. Sebab bila tujuannya mengurangi impor BBM, jangan sampai justru beralih ke ketergantungan impor etanol.

"Pemerintah harus mengalokasikan anggaran untuk pengembangan pabrik etanol dalam negeri dan memberikan insentif kepada industri lokal," imbuh politikus PKS ini.

Nevi menekankan pentingnya edukasi publik dan perlindungan konsumen. Masyarakat harus diberi pemahaman yang cukup mengenai karakteristik BBM campuran etanol agar tidak menimbulkan kekhawatiran berlebihan.

Sehingga harus ada jaminan bahwa kendaraan masyarakat aman. "Untuk kendaraan lama yang berpotensi rusak, berikan insentif atau kompensasi agar mereka tidak dirugikan," saran dia.

Selain itu, Nevi menilai penting adanya dukungan bagi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) agar mampu menyesuaikan fasilitasnya. Caranya dengan memberikan insentif bagi mereka untuk menyesuaikan pipa, tangki, dan stasiun pengisian agar tahan terhadap etanol.

Semangat menuju energi bersih harus tetap diiringi dengan kesiapan teknis, keadilan bagi masyarakat, dan keberpihakan pada industri dalam negeri. "Kebijakan etanol ini baik, tetapi harus dijalankan dengan hati-hati, transparan, dan berpihak pada kemandirian energi nasional," tandasnya.

FOTO: DOC. PRIBADI

Nevi Zuairina

Senada, Anggota Komisi XII DPR Ratna Juwita mendukung E10 sebagai langkah menuju energi bersih. Tetapi jangan sampai kebijakan ini justru membuka keran impor baru. "Kami mendorong percepatan pembangunan pabrik bioetanol berskala besar di Bojonegoro, Jawa Timur," ucapnya, kemarin.

Ratna menilai, kapasitas pabrik yang sudah ada saat ini masih jauh dari kata cukup untuk memenuhi kebutuhan etanol sebagai campuran BBM. Sehingga pabrik di Bojonegoro harus jadi prioritas nasional. "Jangan hanya *groundbreaking*, tetapi harus segera beroperasi agar bisa menutup defisit pasokan etanol," desak politikus PKB ini.

Dia menerangkan, tanpa pabrik di Bojonegoro, target E10 akan sulit tercapai tanpa impor. Berdasarkan data Kementerian ESDM, kapasitas terpasang produksi etanol nasional pada 2024 mencapai sekitar 303 ribu kiloliter (kL) per tahun, dengan realisasi produksi baru sekitar 161 ribu kL.

Padahal jika program E10 diberlakukan secara penuh, kebutuhan etanol nasional diperkirakan mencapai 890 ribu kL per tahun atau sekitar 890 juta liter. "Artinya masih ada kesenjangan lebih dari 700 ribu kL yang perlu ditutup dengan peningkatan kapasitas produksi dalam negeri," tegasnya.

Melihat fakta itu, saran Ratna, Pemerintah harus memberikan perhatian khusus sebelum menerapkan E10 secara nasional. Kemandirian energi hanya bisa terwujud jika seluruh rantai produksi etanol mulai dari bahan baku hingga distribusi sepenuhnya dikuasai oleh industri dalam negeri.

Kebijakan energi hijau harus berdampak pada peningkatan kapasitas nasional, bukan memperkuat ketergantungan impor. "Pemerintah harus belajar dari pengalaman biodiesel, kesiapan industri menjadi kunci keberhasilan," kata dia.

Berbeda, anggota Komisi XII DPR Ateng Sutisna menilai, rencana penerapan E10 dalam BBM perlu dikaji ulang. Meski penggunaan etanol baik bagi lingkungan, tapi belum sepenuhnya cocok dengan kondisi mesin kendaraan yang digunakan oleh masyarakat Indonesia saat ini. "Saat teknologi mesin mobil semakin canggih, etanol akan menjadi pilihan yang lebih baik," ujarnya, kemarin.

Ateng menjelaskan, sebagian besar kendaraan di Indonesia masih menggunakan sistem pembakaran konvensional. Sehingga belum sepenuhnya siap menerima kadar etanol tinggi dalam bahan bakar. Campuran etanol yang terlalu besar berpotensi memengaruhi performa dan daya tahan komponen tertentu.

Untuk saat ini, kata dia, belum tepat jika langsung diterapkan tambahan etanol E10. Tapi ketika teknologi mesin di Indonesia sudah lebih maju, kebijakan ini akan lebih ideal untuk mendukung transisi energi bersih.

Selain itu, Ateng mendorong Pemerintah untuk melibatkan para ahli otomotif dan industri kendaraan dalam setiap penentuan campuran etanol. Tujuannya agar dampak terhadap performa mesin dapat diantisipasi dengan baik.

Ateng ingin proses transisi energi yang sukses, bukan transisi yang dipaksakan. "Jadi langkahnya harus bertahap, menyesuaikan kesiapan teknologi nasional," tandasnya politikus PKS ini. ■ TIF